Radar Bali

Kasi Pengairan PUPR Ditahan

Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Tukad Mati Legian

DENPASAR-Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Senin (2/10) petang menahan satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tukad Mati di Legian, Kuta, Badung.

Tersangka yang ditahan dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, itu yakni Kepala seksi (Kasi) Pengairan dan Pemeliharan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Badung, I Wayan Seraman alias IWS. Seraman yang didampingi penasehat hukumnya, I Kadek Agus Suparman dan Gde Manik Yogiartha serta anak dan istri sempat diperiksa selama hampir 7 jam di ruang Pidsus Kejari Denpasar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Tri Syahru Wirakosada didampingi Kasi Intelejen yang juga Humas Kejari Denpasar, IGNA Kusumayasa Diputra, menyatakan penahanan tersangka dilakukan untuk mempermudah penyidikan. "Sesuai pasal 54 ada alasan subjektif dan obyektif. Penahanan dilakukan karena takut tersangka kabur, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya," jelas Syahru.

Lebih lanjut kata Syahru, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersangka Seraman tidak melaksanakan tupoksi sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan proyek yang dikerjakan tidak sesuai kontrak. I Wayan Seraman seharusnya melakukan pengawasan dalam proyek sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Sedangkan terkait kerugian negara, penyidik masih menunggu hasil perhitungan resmi dari BPKP wilayah Bali. "Perhitungan sementara dari tim ahli ada kerugian Rp 700 juta. Tapi kami masih menunggu hasil perhitungan resmi dari BPKP Wilayah Bali," lanjut Syahru.

Lalu bagaimana dengan dua tersangka lain? Ditanya begitu, Syahru mengatakan, untuk dua tersangka lainnya dalam perkara ini yaitu rekanan (PT Undagi Jaya Mandiri), I Wayan Su dan Kabid Pengairan PUPR Badung yang juga PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek berinisial AGD masih dalam penyidikan. "Untuk tersangka lainnya masih tahap penyidikan," bebernya.

Termasuk Kepala Dinas (Kadis) PUPR Badung, IB Surya Suamba yang dalam proyek ini sebagai Pengguna Anggaran (PA), pihak penyidik juga mengaku secara marathon sudah memeriksa yang bersangkutan dengan status masih sebatas saksi. "Setelah ini kami akan melakukan pemberkasan sambil menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Wilayah Bali keluar. Nanti kami akan informasikan lagi kalau ada perkembangan kasus ini," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka Seraman dikonfirmasi disela penahanan kliennya, mengatakan ada banyak kejanggalan dalam perkara ini. Diantaranya terkait kerugian negara yang sampai saat ini belum ada. Dijelasknnya, seharusnya sebelum melakukan penahanan penyidik sudah mendapatkan hasil kerugian negara yang resmi dari BPK atau BPKP Wilayah Bali.

Namun sampai saat ini hasil kerugian negara tersebut belum ada. Penyidik hanya membuat kerugian negara berdasarkan perhitungan saksi ahli. "Harusnya *kan* ada kerugian negara dulu baru bisa melakukan penahanan," tegas Agus Suparman.

Ia mengatakan pihaknya akan mempelajari lagi perkara ini dan kemungkinan besar akan melakukan Praperadilan jika memang tidak ada kerugian negara dalam perkara ini. Sebagaimana diketahui Kasus ini sendiri berawal dari laporan warga yang mengatakan jika pembangunan senderan Tukad Mati di Legian, Kuta mengalami masalah. Pasalnya, baru saja selesai dan diserahterimakan, sudah ada beberapa bagian yang retak dan jebol. Proyek senderan Tukad Mati tersebut membentang sepanjang 570 meter dengan anggaran Rp 2,2 miliar yang digarap oleh PT Undagi Jaya Mandiri sejak awal 2016 lalu. **(pra/dot)**

Edisi : Selasa, 3 Oktober 2017

Hal : 3

Radar Bali

TUNJANGAN DEWAN

Mobil Dinas Mulai Dikembalikan

SEMARAPURA - Sejalan dengan pencairan tunjangan transportasi yang akan dimulai bulan ini sesuai dengan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Klungkung. Mobil dinas yang selama ini dipakai anggota DPRD Klungkung akan diserahkan ke daerah, hari ini (3/10).

"Kebijakan ini, sesuai dengan pencairan tunjangan transportasi yang mulai berlangsung bulan ini. Hal ini sudah disampaikan memalui surat," papar Sekretaris Dewan Kabupaten Klungkung I Wayan Sudiarta, Senin (2/10). Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, dikatakannya, penarikan mobil dinas akan dilakukan pada tiga unit mobil yang digunakan ketua komisi, satu unit dari Ketua Badan Kehormatan (BK), satu unit dari Ketua Badan Legislatif (Baleg) dan enam unit dari pimpinan fraksi. Dari jumlah tersebut, lima unit mobil diserahkan ke daerah. "Sementara sisanya digunakan untuk operasional di DPRD Klungkung seperti kegiatan observasi. Penyerahan ke daerah dilakukan besok (hari ini-red)," ungkapnya. **(ayu/gup)**

Edisi : Selasa, 3 Oktober 2017

Hal : 2